
KEKUASAAN POLITIK DAN KEBIJAKAN

Oleh : Asep Suryana M.Pd.



**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2007**

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana politik adalah salah satu bentuk untuk memperoleh kekuasaan “how to get the power”. Ketika kita membicarakan politik maka sebenarnya kita membicarakan suatu strategi bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan adalah energi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memuluskan tujuan yang ingin dicapainya. Kekuasaan dalam politik artinya menghimpun dan menempatkan energi setiap orang dalam kelompok untuk memperoleh kekuatan dalam memuluskan dan mencapai tujuan yang hendak dicapainya.

Kekuasaan dalam politik kadang kelihatannya sangat “kotor”, karena strategi seseorang atau kelompok dalam berpolitik memungkinkan menggunakan berbagai cara yang pada akhirnya harus mengorbankan seseorang atau kelompok lainnya. Dengan berbagai alasan apakah tidak satu ideology sampai kepada tidak sepaham secara budaya atau dogmatis agama.

Kekuasaan yang diperoleh karena politik adalah upaya untuk menguasai masyarakat kebanyakan (pupils) secara ideological sehingga pemilik kekuasaan berada pada posisi tertinggi atau sering disebut kaum “elit”.

Kaum elit sebagai minoritas adalah kelompok mayoritas dalam kekuasaan, sehingga segala bentuk perilaku masyarakat kebanyakan sering diindahkan sebagai perilaku yang harus seragam. Keseragaman dalam kacamata politik berbentuk statetemen yang kemudian diturunkan menjadi sebuah kebijakan bagi masyarakat kebanyakan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh kaum elit akan mengatur segala perilaku orang dalam menjalankan dan memberikan sumbangsih terhadap kehidupan, baik dalam kehidupan bernegara bahkansampai kepada kehidupan bermasyarakat.

B. ANALISIS KEKUASAAN DALAM KACAMATA POLITIK

1. Terminologi Kekuasaan

Terminologi umum dapat digunakan bagi seorang pemimpin baik formal maupun informal. Kadang power dikaitkan dengan kekuatan. Authority sejenis kekuasaan yang terkait didalam jabatan/posisi yang dipegang dalam org.

Authority /wewenang ; kewenangan yg dibatasi oleh tugas-tugas & tanggungjawab yg diberikan. Power dalam arti authority mempunyai hierarki sesuai struktur organisasi

- Thompson, James, D
Kekuasaan adalah gejala structural yang pokok dan harus dikuasai dan direkayasa oleh pimpinan organisasi
- Allen, Robert W & Lyman W. Potter
Pengaruh dan kekuasaan itu mengalir dari atas ke bawah (authority) dan dari bawah ke atas
- Mintzberg
Perilaku organisasi adalah permainan kekuasaan.
- Herbert A. Simon
Kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan yg mengarahkan kegiatan-kegiatan bawahan kepada tujuan tertentu
- Chester Y Barnard
Siapa saja yg menjadi pemimpin, siapa saja bisa jadi pemimpin asal punya kemampuan (power)
- Rocco Cazo Jr.
Kekuasaan adalah suatu cara untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan mempengaruhi itu adalah kemampuan seseorang.
- Antonio Gramsci
Kehidupan telah dikuasai oleh kekuasaan Negara atau kekuasaan public yang telah merembes kedalam wilayah privat. Sistem kekuasaan yang didasarkan kepada consensus yang dilaksanakan oleh Negara di sebut hegemoni. Hegemoni adalah kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau dosikong oleh kelas tertentu. Pendidikan dan pengembangan kebudayaan dapat merupakan langkah-langkah bagi perlawanan suatu hegemoni.
- Schopenhauer ke Nietzsche dan Posmodernisme Foucot
Sumber kekuasaan tidak dapat dari kekuatan yang transenden tetapi berada dalam diri manusia yaitu kehendak (will). Kehendak akan kekuasaan, dunia

ini dalam keadaan terus menerus bertarung, namun konflik kekuasaan tetap ada maknanya karena hasilnya yang kreatif, sehat dan produktif. Kekuasaan digunakan untuk mengontrol dan menghukum, demikian pula praktik-praktik disipliner digunakan untuk menciptakan subjek-subjek manusia yang mengatur perilakunya.

2. Dinamika Kekuasaan dan Kewenangan

Untuk memahami kekuasaan dan kewenangan secara utuh, maka kita harus menelusuri terlebih dahulu dinamika dalam kekuasaan dan kewenangan. Untuk mengetahuinya ada sejumlah pertanyaan dasar yang dapat digunakan, seperti berikut ini:

a) Mengapa orang berkuasa atas orang lain ?

Kelebihan apa yang dimiliki oleh seseorang sehingga begitu berkuasa/memiliki kekuasaan atas orang lain dan kepatuhan muncul dari orang yang dikuasainya. Artinya kita harus memahami basis kekuasaan mana yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga berkuasa dan sumber-sumber daya mana saja yang dimilikinya untuk melanggengkan kekuasaannya.

b) Alat apa yang dipergunakannya ?

Kekuasaan dapat berlangsung dengan baik dan kepatuhan dapat dipertahankan. Kepatuhan yang muncul biasanya karena instrumen dalam berkuasa cocok. Kecocokan yang muncul (kepatuhan) berada dalam banyak dimensi, seperti berikut:

- Dimensi Ideologi

- Kaitannya dengan pemahaman tentang sesuatu dari seseorang, dimana pemahaman tersebut memiliki titik nilai yang sama dengan cara pandang orang lain yang diikutinya.
- Kesamaan dalam cara pandang ini akan menjadi dasar dalam kekuasaan, jenis yang bisa digunakan adalah melalui penggunaan sejumlah Indoktrinasi yang membawa orang dalam kesamaan cara pandang tersebut.

- *Ekonomi*
 - Bagaimana memperoleh hasil dengan sejumlah usaha yang dilakukan, sebagai perseorangan atau dalam bentuk badan usaha
 - Penguasaan sumber-sumber daya/dana yang fatal bagi hidup orang lain
- *politik*
 - Politik adalah kegiatan dimana orang bernegosiasi, berkolaborasi dan bekerjasama untuk; “How to get the power?”
 - Politik adalah sebuah bentuk kegiatan dalam memainkan peranan sebagai sentral/pusat dari sesuatu kelompok mayoritas atau kelompok minoritas yang mewakili kelompok mayoritas.
- *Budaya*
 - Hasil rasa dan karsa atau karya yang menjadikan orang secara tidak sadar terpolakan perilakunya, atau yang secara sadar merasa baik untuk mengadopsinya menjadi bagian dari perilakunya.
 - Budaya masa bodoh (permissive)
- *Militer*
 - Kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan militerisme.
 - Kekuasaan dengan senjata.
- *Komunikasi*
 - Nilai dari pesan (message).
 - Kedudukan dalam komunikasi (retorika).
 - Media komunikasi yang dipergunakan.
 - Jaringan komunikasi (teknologi).

c) *Target/Tujuan.*

Target akhir dari kekuasaan adalah kepatuhan, akan tetapi perlu di lihat sampai sejauh mana kepatuhan itu muncul. Kepatuhan yang muncul memiliki kadar yang berbeda beda, dan hal ini menggambarkan tingkat efektivitas kekuasaan yang dimilikinya. Kepatuhan yang muncul akan berbentuk seperti berikut ini:

- a. Ketakutan (untuk menghindari ancaman-ancaman atau teror yang terjadi)

- b. Self Identifine (patuh karena cinta) – Poppy love.
- c. Tradisional (kepatuhan pada tingkat emosional secara sosio kultural)
- d. Perhitungan (kepatuhan karena suatu perhitungan-perhitungan tertentu berdasarkan untung rugi – kalkulatif)
- e. Kesesuaian nilai-nilai (kepatuhan karena ikatan-ikatan yang bersifat normatif – nilai yang hakiki dalam kehidupan).

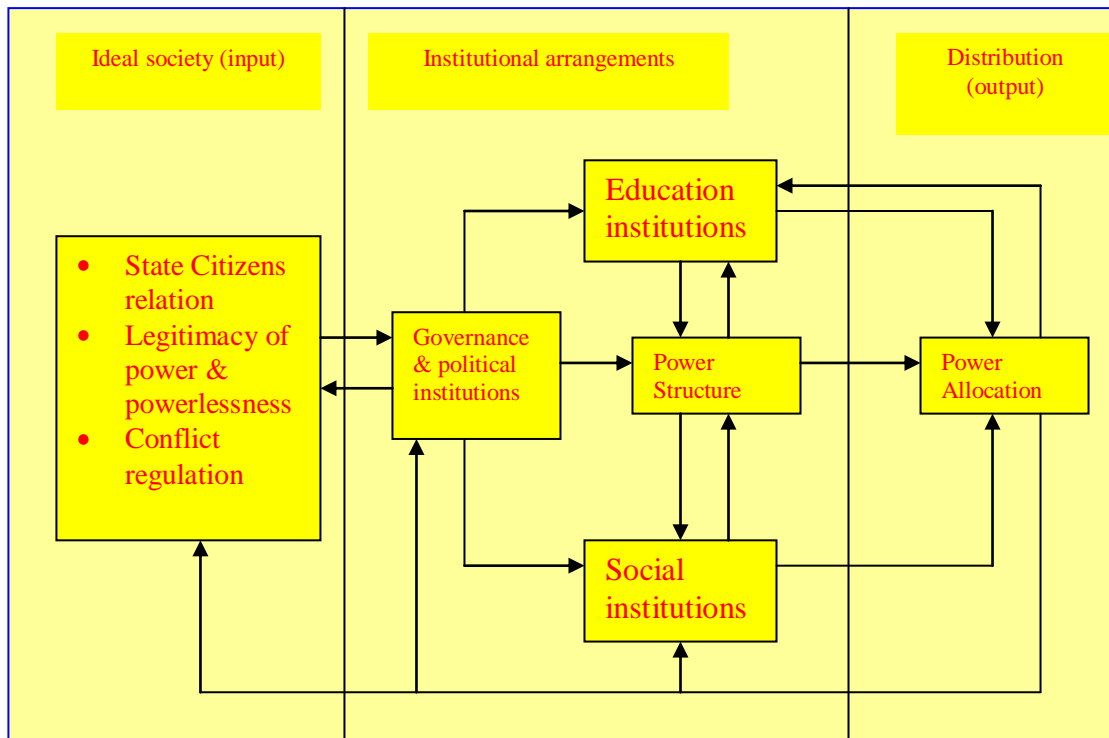
C. KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN POLITIK

1. Kekuasaan Politik dalam Pendidikan

Kebijakan adalah sebuah bentuk produk yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dengan teratur dan saling ketergantungan secara simbiosis mutualisme, kebijakan tidak memihak terhadap kepentingan salah satu orang atau kelompok. Dengan kebijakan yang dibuat memberikan peluang kepada setiap orang untuk dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Kebijakan dalam bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk mengatur pendidikan sehingga memungkinkan setiap orang dapat masuk kedalamnya dan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Secara skematis kebijakan dalam bidang pendidikan juga tidak dapat terlepas dari kekuasaan secara politis. Akan tetapi titik akhirnya pendistribusian kekuasaan melalui kebijakan yang dilahirnkannya adalah upaya untuk emngalokasikan kekuasaan sampai pada titik masyarakat terendah untuk merasakan dan memiliki produk-produk kebijakan yang dihasilkan sebagai bagian dari pada dirinya/kelompoknya secara utuh. Sehingga dapat digambarkan seperti berikut ini:



Sumber; Diadaptasi dari Dimetrius Iatridis (1994:87)

Pendidikan dari dulu hingga akhir dewasa ini masih dipandang sebagai suatu kegiatan yang akan menyelamatkan kelangasungan hidup manusia. Pendidikan dalam sebuah negara adalah bagian dari tanggungjawab penyelenggara negara, sehingga maju mundurnya suatu negara sangat ditentukan oleh mampu atau tidaknya negara tersebut menyelenggarakannya. Pendidikan adalah hak setiap manusia, karena berinteraksi adalah hakekat kehidupan manusia sehingga pendidikan terjadi karena sebuah interaksi.

Interaksi dalam pendidikan bisa terjadi dalam konteks kelembagaan dan juga perseorangan. Interaksi secara perseorangan sering disebut dengan pembelajaran, dimana seseorang kepada orang lain berupaya untuk memberikan sesuatu yang diminta oleh orang lain itu dan dimana orang yang menyampaikannya memiliki kelebihan dalam ilmu dan pengetahuan. Interaksi secara kelembagaan menggambarkan bahwa pendidikan sudah merupakan kegiatan yang diatur dan merupakan tanggungjawab sebuah lembaga yang menaungi semua kegiatan yang ada didalamnya.

Pemaknaan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan muncul dalam kondisi masyarakat serba sekolah di suatu negara. Kemunculannya tidak hanya secara evolusi alami akan tetapi tuntutan karena interkasi antar masyarakat dan antar negara. Pengkondisian ini yang menyebabkan banyak kepentingan di dalam penyelenggaraannya. Kepentingan dalam pengelolaan pendidikan dimunculkan karena adanya struktur dan dalam struktur tersebut kita dapat mengukur seberapa besar kepentingan atau tugas dan tanggungjawab dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang. Struktur menggambarkan kewenangan dan tingkatan, tingkatan kewenangan menggambarkan salah satu legalitas kekuatan/kekuasaan atas orang, kelompok orang dan kelembagaan.

Kekuasaan dalam pendidikan adalah sebuah bentuk legalitas terhadap kepemimpinan yang dijalankannya, legalitas artinya kebermaknaan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan adalah kekuasaan individual ataupun kolektivitas. Kekuasaan dan pendidikan sebenarnya memiliki dua makna, makna pertama kekuasaan adalah bentuk kewenangan dalam kelembagaan pendidikan, dan makna kedua adalah pendidikan melahirkan kekuasaan yang baik.

2. Kekuasaan dalam Pendidikan

a) Kekuasaan Transformatif

Proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain.

Membangkitkan refleksi, dan refleksi tersebut menimbulkan aksi. Orientasi yang terjadi dalam aksi tersebut merupakan orientasi yang adokatif.

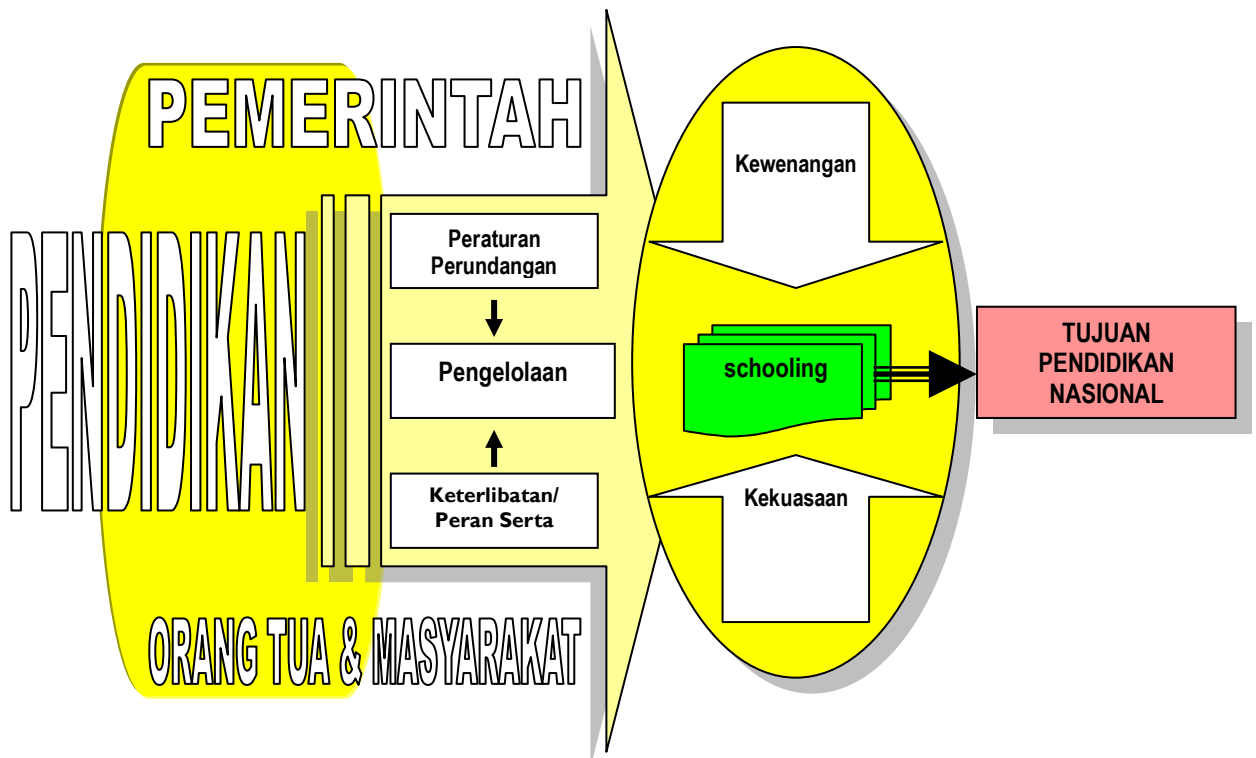
b) Kekuasaan Transmitif

Terjadi proses tranmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri.

Orientasi kekuasaan besifat legitimatif, dengan demikian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kekuasaan adalah suatu aksi dari subjek kekuasaan yang bersifat robotik karena sekedar menerima atau dituangkan ke dalam sesuatu bejana subjek yang bersangkutan.

c) *Pendidikan yang dilaksanakan karena kekuasaan*

Kerangka pikir pendidikan dan kekuasaan secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:



Ada empat masalah yang berkaitan dengan pendidikan yang dilaksanakan dengan kekuasaan;

1) Domestikasi dan stupidikasi pendidikan

Peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik menjadi budak-budak dan alat dari penjajahan mental dari yang mempunyai kekuasaan.

Domestifikasi akan membunuh kreativitas dan menjadikan manusia sebagai robot-robot yang sekedar menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Hasilnya bukan pembebasan akan tetapi pembedahan.

2) Indoktrinasi

Kurikulum yang ada dipandang sebagai indoktrinasi atau mentranmisikan ilmu pengetahuan secara paksa.

Penyusunan kurikulum silih bergant berubah hal ini menggambarkan betapa kuku kekuasaan menancap begitu kuat, sebelum segala sesuatunya memperoleh penampaan hasil yang memuaskan. Ketika suatu kurikulum ditetapkan maka tidak ada kebebasan dari lembaga pendidikan untuk berkreasi menyusun kurikulumnya sendiri.

3) Demokrasi dalam Pendidikan

Pendidikan yang demokratis melahirkan manusia-manusia yang penuh problematik dengan alteratif-alternatif yang dikembangkan oleh kemampuan akal budinya untuk mencari solusi yang terbaik.

Pendidikan yang demokratis bukan hanya sekedar prinsip akan tetapi penuangan dan pengembangan tingkah laku yang membebaskan manusia dari kungkungan.

Tumbuhnya demokratisasi dalam pendidikan mendukung multikulturalisme dalam pendidikan. Multikulturalisme melihat sumber kekuasaan bukan dari segi yang monolitik tetapi dari segi yang beragam.

4) Integrasi Sosial

Ada anggapan bahwa integritas sosial hanya dapat diciptakan melalui kekuasaan pemerintah. Integritas sosial ternyata tidak dapat diciptakan dengan pemaksaan kekuasaan dari atas.

D. PENUTUP

- ◆ Akal budi dalam mengambil keputusan dalam berbagai kondisi dan keterikatan manusia dalam lingkungan budayanya.
- ◆ Kekuasaan dalam pendidikan mengenal batas-batas, batas kekuasaan yang dimaksud bukan pada pencarian dasar legitimatif kekuasaan itu sendiri akan tetapi makna kekuasaan bagi pengembangan kebebasan manusia.
- ◆ Pengakuan atas hak asasi manusia.
- ◆ Komunikasi pendidik dengan peserta didik

- ◆ Kurikulum bukan alat doktrinasi.
- ◆ Pendidikan tidak terlepas dari politik dalam pengertian politik praktis, akan tetapi politik yang tidak sesuai dengan pendidikan demokratis.
- ◆ Pendidikan dan ekonomi, pendidikan hadala investasi yang mahal.

E. DAFTAR REFERENSI

Yukl, Gary A., (1989), *Leadership In Organizations*, Prentice-Hall International, Inc., New York.

Lary Lashway, ERIC Digest ; The Strategies of a Leader.htm, 2000.

Beckhart, Richard, (1985), *Organizational Development: Model and Strategi* (alih bahasa Ali Saidullah), Usaha Nasional, Surabaya.

Reksohadiprojo, S., (1999), *Organisasi: Teori Struktur Dan Perilaku*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta.

Owens, Robert G. (1991). *Organizational Behavior in Education, Fourth Edition*. Prentice Hall Inc.

Robbin, Sthephen P. (1998). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications eight edition*. Prentice Hall Inc.

Leslie A. Pal., (1992), *Public Policy Analysis; An Introduction*, Department of Political Science University of Calgary, Canada.

Patton Carl V., Sawicki David S., (1986), *Basic Methods of Policy Analysis & Planning*, Prentice-Hall, New Jersey.

Dunn N. William, (2004), *Public Policy Analysis; An Introduction*, Prentice-Hall, New Jersey.

Iatridis Demetrius, (1994), *Social Policy; Institutional Context of Social Development and Human Service*, Pacific Grove, California.